RENCANA KERJA
TAHUN 2021
Direktorat Usaha Hutan Produksi

Kementerian Lingkungan Hidup daN Kehutanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Direktorat Usaha Hutan Produksi
JANUARI 2021

DAFTAR ISI

.....1

KATA PENGANTAR.....5

BAB I 6

PENDAHULUAN 6

BAB II.....9

CAPAIAN TAHUN 2020 9

1. Subdit Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Alam 9

2. Subdit Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman 13

3. Subdit Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam.....18

4. Subdit Penilaian Kinerja Usaha Hutan Tanaman.....20

BAB III 30

ARAHAN KEBIJAKAN 30

BAB IV 34

RENCANA KEGIATAN 34

A. PROGRAM DAN SASARAN PROGRAM.....34

B. KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN.....36

C. ANGGARAN 38

BAB V 39

PENUTUP.....39

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realiasasi Penanaman SILIN Tahun 2020 10
Tabel 2. Perkembangan RKUPHHK-HTI (s/d Desember 2020) 14
Tabel 3. Perkembangan RPKH (s/d Desember 2020) 15
Tabel 4. Perkembangan Tanaman pada IUPHHK-HTI dan Perum Perhutani 15
Tabel 5. Perkembangan Produksi pada IUPHHK-HTI dan Perum Perhutani 16
Tabel 6. Obrik Evaluasi Kinerja IUPHHK-HT 21
Tabel 7. Obrik Pembinaan Peningkatan Kinerja IUPHHK-HT / Perhutani 21
Tabel 8. Obrik HTI skema P. 39/Menhut-II/2008 21
Tabel 9. Jumlah Pegawai Lingkup Direktorat Usaha Hutan Produksi Tahun 2020 24
Tabel 10. Jumlah Pegawai Lingkup Direktorat Usaha Hutan Produksi 2020 berdasarkan Golongan Pangkat 24
Tabel 11. Jumlah Pegawai Lingkup Direktorat Usaha Hutan Produksi Tahun 2020 25
Tabel 12.Pencapaian realisasi anggaran per indikator keluaran 27
Tabel 13. Tingkat Pencapaian Kinerja Kegiatan 28
Tabel 14. Tingkat Pencapaian Sasaran 28
Tabel 15. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Usaha Hutan Produksi 31
Tabel 16. Permasalahan IUPHHK-HA dan Arah Kebijakan 31
Tabel 17. Permasalahan IUPHHK-HT dan Arah Kebijakan IUPHHK-HT 33
Tabel 18. Kegiatan peningkatan hutan produksi tahun 2021 Direktorat Usaha 38
Tabel 19.Tabel Rencana Kegiatan dan Anggaran Direktorat Usaha Hutan Produksi Tahun 2021 41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.Struktur Organisasi Direktorat Usaha Hutan Produksi.....8

KATA PENGANTAR

Berdasarkan PermenLHK No.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana pada pasal 559 Direktorat Usaha Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang usaha hutan produksi serta penyusunan evaluasi kinerja terhadap perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi.

Pelaksanaan tupoksi secara konkrit adalah penilaian kinerja UPHHK (HT dan HA) dan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HT dan HA).

Sesuai dengan Renaksi IKK pada Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, Direktorat Usaha Hutan Produksi sampai dengan tahun 2021 menetapkan target IUPHHK (HA dan HT) yang aktif 391 unit, Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi 688.000 ha, Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi 6.000 ha, produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi 97 juta m^3, Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat 30.000 ha dan IUPHHK (HA dan HT) yang mendapat sertifikat kinerja PHPL kategori sedang-baik 340 Unit.

Semoga Rencana Kerja Tahun 2021 ini dapat bermanfaat bagi Direktorat Usaha Hutan Poduksi dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Jakarta, Januari 2021

Direktur Usaha Hutan Produksi

Ir. Istanto, M. Sc.
NIP. 19621119 199003 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 559 PermenLHK No.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Usaha Hutan Produksi mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang usaha hutan produksi serta menyusun bahan evaluasi kinerja terhadap perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi. Selain itu, Pasal 560 Direktorat Usaha Hutan Produksi mempunyai fungsi menyiapkan rumusan bahan kebijakan dan melaksanakan bahan kebijakan rencana karya usaha, produksi hasil hutan dan penilaian kinerja usaha hutan produksi, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria rencana karya usaha, produksi hasil hutan dan penilaian kinerja usaha hutan produksi, memberikan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rencana karya usaha, produksi hasil hutan dan penilaian kinerja usaha hutan produksi dan pelaksanaan administrasi Direktorat.

Direktorat Usaha Hutan Produksi secara struktur terdiri dari : 1) Sub Direktorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Alam 2) Sub Direktorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman 3) Sub Direktorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam, 4) Sub Direktorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Tanaman 5) dan Subbagian Tata Usaha.

Dalam rangka pencapaian program Ditjen PHPL, Direktorat Usaha Hutan Produksi secara teknis bertanggung jawab atas tercapainya sasaran berupa meningkatnya produktivitas hutan alam dan hutan tanaman, meningkatnya produksi hasil hutan kayu dari hutan alam dan hutan tanaman, meningkatnya hak akses masyarakat pada kawasan hutan produksi, meningkatnya kinerja Pengelola Hutan Alam dan Hutan Tanaman melalui kegiatan peningkatan usaha hutan produksi yang dilakukan oleh pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam (IUPHHK-HA) dan hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI). Berdasarkan data monitoring sampai dengan Desember 2020, jumlah IUPHHK-HA sebanyak 257 unit seluas 18.702.359 ha dan IUPHHK-HT sebanyak 294 unit seluas 10.974.457,58 ha.

Untuk mencapai sasaran program Direktorat Usaha Hutan Produksi, indikator kinerja Kegiatannya (IKK) adalah :

1) IUPHHK-HA dan HT yang aktif sebanyak 439 Unit hingga tahun 2024 dan untuk mencapai target IKK tersebut sampai dengan tahun 2021 melalui kegiatan peningkatan kinerja (pembinaan dan evaluasi) ditargetkan sebanyak 391 Unit;
2) Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi seluas 1,97 juta ha hingga tahun 2024 dan untuk mencapai target IKK tersebut sampai dengan tahun 2021 ditargetkan seluas 688.000 ha;
3) Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi seluas 15.000 ha hingga tahun 2024 dan untuk mencapai target IKK tersebut sampai dengan tahun 2021 ditargetkan seluas 6.000 ha;
4) Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat seluas 65.000 ha hingga tahun 2024 dan untuk mencapai target IKK tersebut sampai dengan tahun 2021 ditargetkan seluas 30.000 ha;
5) Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi sebanyak 269 juta m^3 hingga tahun 2024 dan untuk mencapai target IKK tersebut sampai dengan tahun 2021 ditargetkan sebesar 97 juta m^3 dan
6) IUPHHK-HA dan HT yang mendapat sertifikat kinerja PHPL kategori **sedang-baik** sebanyak 385 unit hingga tahun 2024 dan untuk mencapai target IKK tersebut sampai dengan tahun 2021 melalui kegiatan peningkatan kinerja (pembinaan dan evaluasi) ditargetkan sebanyak 340 Unit.

Dalam mencapai sasaran program tersebut, dilaksanakan oleh Direktorat Usaha Hutan Produksi berbasis Subdirektorat lingkup Direktorat Usaha Hutan Produksi dengan susunan organisasi sebagai berikut:

DIREKTORAT USAHA HUTAN PRODUKSI

Gambar 1.Struktur Organisasi Direktorat Usaha Hutan Produksi

BAB II
CAPAIAN TAHUN 2020

1. Subdit Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Alam

Dalam rangka kelancaran tugas di bidang Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Alam sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja hasil hutan kayu, produksi hutan dan pemanfaatan kayu pada areal pemanfaatan hutan;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana kerja hasil hutan kayu, produksi hutan alam dan pemanfaatan hutan;
c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rencana kerja hasil hutan kayu, produksi hutan alam dan pemanfaatan kayu pada areal pemanfaatan hutan; dan
d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rencana kerja hasil hutan kayu, produksi hutan alam dan pemanfaatan kayu pada areal pemanfaatan hutan.

Tugas umum pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh Subdit Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Alam antara lain meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. Penilaian dan persetujuan usulan RKUPHHK-HA pada hutan produksi.
   Jumlah pemegang IUPHHK-HA yang mengajukan usulan RKUPHHK-HA/Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB sampai dengan Desember 2020 sebanyak 62 (enam puluh dua) unit yang terdiri dari :
   a) Usulan RKUPHHK-HA sebanyak 49 (empat puluh sembilan) dokumen
   b) Usulan Revisi RKUPHHK-HA sebanyak 13 (tiga belas) dokumen
   Persetujuan RKUPHHK-HA/Revisi sampai dengan Desember 2020 sebanyak 50 (lima puluh) unit yang terdiri dari :

a) Persetujuan RKUPHHK-HA sebanyak 40 (empat puluh) dokumen

b) Persetujuan Revisi RKUPHHK-HA sebanyak 10 (sepuluh) dokumen

Proses penelaahan dan melengkapi dokumen RKUPHHK-HA/Revisi RKUPHHK-HA sampai dengan Desember 2020 sebanyak 12 (dua belas) unit

b. Pembinaan dan pengendalian peningkatan produktifitas areal bekas tebangan (*Logged Over Area*/LOA) pada hutan alam melalui penerapan Silvi kultur Intensif (SILIN) sampai dengan Desember 2020 sebanyak 65 (enam puluh lima) unit IUPHHK-HA yang telah merencanakan melaksanakan SILIN sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA yang telah disahkan. Daftar IUPHHK-HA yang telah melaksanakan penanaman SILIN tahun 2020 disajikan pada Tabel 5.

Tabel 1. Realiasasi Penanaman SILIN Tahun 2020

No	Nama IUPHHK-HA	Provinsi	Realisasi Penanaman (Ha)
1	Minas Pagai Lumber Corp, PT	Sumatera Barat	350
2	Dwima Jaya Utama, PT	Kalimantan Tengah	5
3	Erna Djuliawati, PT	Kalimantan Tengah	2.350
4	Gunung Meranti, PT	Kalimantan Tengah	84
5	Pemantang Abaditama, PT	Kalimantan Tengah	7
6	Praba Nugraha Technology, PT	Kalimantan Tengah	39
7	Sari Bumi Kusuma, PT	Kalimantan Tengah	90
8	Sarmiento Parakantja Timber, PT	Kalimantan Tengah	320
9	Balikpapan Wana Lestari, PT (d.h. Balikpapan Forest Ind., PT)	Kalimantan Timur	50
10	Gunung Gajah Abadi, PT	Kalimantan Timur	10
11	Karya Lestari, PT	Kalimantan Timur	1
12	Timber Dana, PT	Kalimantan Timur	20
13	Inhutani I Unit Segah Hulu, PT	Kalimantan Utara	10
14	ITCI Kayan Hutani, PT	Kalimantan Utara	387
15	Telaga Bhakti Persada, PT	Maluku Utara	114
16	Tunas Timber Lestari, PT	Papua	297
	TOTAL		**4.134**

c. Pelaksanaan kegiatan IHMB tahun 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 dengan rincian :
   1) IUPHHK-HA yang mengajukan dokumen rencana IHMB sebanyak 53 (lima puluh tiga) unit.
   2) IUPHHK-HA izin baru yang belum mengajukan IHMB sebanyak 1 (satu) unit.
   3) Yang menyampaikan laporan hasil pelaksanaan sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit.
   4) Surat pertimbangan teknis hasil IHMB untuk menyusun RKUPHHK-HA kepada IUPHHK-HA sebanyak 17 (tujuh belas) unit.
d. Pembinaan dan pengendalian perizinan Rencana Kerja Tahunan (RKT) UPHHK pada hutan alam berdasarkan monitoring Subdit Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Alam s.d bulan Desember 2020, jumlah RKT Tahun 2020 yang telah disetujui adalah 184 unit manajemen yang terdiri dari RKT disetujui oleh Kepala Dinas yang diberi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di Provinsi sebanyak 71 unit manajemen dan *self approval* 113 unit manajemen dari total IUPHHK-HA sebanyak 257 unit.
e. Pembinaan, pengendalian dan monitoring pelaksanaan TPTI pada hutan alam pelaksanaan TPTI dilakukan melalui situs SIPUHH online dan pengamatan laporan TPTI yang disampaikan oleh pemegang IUPHHK, khususnya untuk kegiatan :
   1) Produksi Kayu Bulat.
      a) Telah memperoleh persetujuan RKTUPHHK Tahun 2020 dari Kepala Dinas yang diberi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di Provinsi sebanyak 71 (tujuh puluh satu) unit IUPHHK–HA.
      b) Telah memperoleh persetujuan RKTUPHHK Tahun 2020 secara *self approval* sebanyak 113 (seratus tiga belas) unit IUPHHK–HA.
      c) Tidak memperoleh persetujuan RKTUPHHK Tahun 2020 sebanyak 73 (lima puluh tiga) unit IUPHHK–HA.
      d) Realisasi produksi kayu bulat tahun 2020 s.d tanggal 31 Desember 2020 yang berasal dari IUPHHK-HA adalah sebanyak 5.272.099,83 m^3.
      e) Realiasi produksi kayu bulat s.d. bulan Desember 2020 yang berasal dari Non IUPHHK-HA (IPK/IPPKH/HGU) sebanyak 916.815,33 m^3.

f) Total realisasi produksi kayu bulat s.d. akhir Desember 2020 yang berasal dari hutan alam adalah 6.188.915,16 m^3.

2) Pembinaan hutan (pengayaan, penanaman tanah kosong dan penanaman kiri kanan jalan) pada Hutan Alam.

a) Pengayaan Areal Bekas Tebangan dengan rencana pengayaan seluas 26.790 Ha dengan realisasi seluas 6.118 Ha (22,84%).

b) Penanaman Kiri - Kanan Jalan dengan rencana penanaman Kiri Kanan Jalan seluas 3.895 Ha dengan realisasi seluas 995 Ha (25,22%).

c) Penanaman Tanah Kosong dengan rencana penanaman tanah kosong seluas 3.866 dengan realisasi seluas 1.044 Ha (27,01%).

d) Penanaman Teknik SILIN dengan rencana penanaman tanah kosong seluas 9.610 dengan realisasi seluas 4.134 Ha (43,02%).

e) Penanaman THPB dengan rencana penanaman tanah kosong seluas 68.182 dengan realisasi seluas 3.203 Ha (4,70%).

3) Pembinaan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan produksi alam.

Berdasarkan monitoring Direktorat Usaha Hutan Produksi s.d 31 Desember 2020 dari 257 unit IUPHHK-HA yang melaporkan, diperoleh sasaran pembinaan dan biaya sebagai berikut :

a) Jumlah Provinsi : 9 (sembilan)

b) Rencana Biaya : Rp. 98.627.830.035, - (Sembilan puluh delapan miliar enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga puluh lima rupiah).

c) Realisasi : Rp. 21.597.604.095,- (dua puluh satu miliar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat ribu Sembilan puluh lima rupiah).

2. Subdit Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman

Dalam rangka kelancaran tugas di bidang Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja hasil hutan kayu, produksi hutan dan pemanfaatan kayu pada areal pemanfaatan hutan;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana kerja hasil hutan kayu, produksi hutan tanaman dan pemanfaatan hutan;
c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rencana kerja hasil hutan kayu, produksi hutan tanaman dan pemanfaatan kayu pada areal pemanfaatan hutan; dan
d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rencana kerja hasil hutan kayu, produksi hutan tanaman dan pemanfaatan kayu pada areal pemanfaatan hutan.

Tugas umum pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh Subdit Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman antara lain meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. Persetujuan RKUPHHK-HTI

Persetujuan RKUPHHK-HTI baik RKUPHHK-HTI yang baru maupun yang revisi pada tahun 2020 telah diberikan kepada 271 pemegang IUPHHK-HTI dari jumlah keseluruhan sebanyak 295 pemegang IUPHHK-HTI definitif dan untuk masing-masing provinsi sebagaimana Tabel 6 di bawah ini :

Tabel 2. Perkembangan RKUPHHK-HTI (s/d Desember 2020)

No	Provinsi	Luas (Ha)	Jumlah IUPHHK-HTI (Unit)	RKU (unit)
1	Aceh	224.571,70	6	5
2	Sumatera Utara	348.514,88	8	8
3	Sumatera Barat	65.432,90	4	3
4	Riau	1.535.256,93	46	46
5	Jambi	680.772,82	18	18
6	Sumatera Selatan	1.316.674,02	19	17
7	Lampung	108.909,00	3	3
8	Bangka Belitung	265.290,29	9	8
9	Kalimantan Barat	1.904.140,02	47	41
10	Kalimantan Tengah	866.149,59	34	28
11	Kalimantan Selatan	547.497,00	17	16
12	Kalimantan Timur	1.650.298,40	47	45
13	Kalimantan Utara	264.249,33	5	4
14	Sulawewsi Utara	7.500,00	1	1
15	Gorontalo	74.146,78	2	2
16	Sulawesi Tengah	73.320,00	2	1
17	Sulawesi Tenggara	54.280,00	3	3
18	Sulawesi Selatan	21.430,00	2	1
19	Sulawesi Barat	10.600,00	1	3
20	Nusa Tenggara Barat	75.810,00	4	3
21	Nusa Tenggara Timur	54.175,00	2	1
22	Maluku	33.245,00	1	2
23	Maluku Utara	65.908,00	5	5
24	Papua Barat	87.224,95	1	1
25	Papua	898.645,00	8	6
Jumlah		**11.235.041,61**	**295**	**271**

Sumber Data : *) 1. Data IUPHHK-HTI (KPHP), 2. Laporan Bulanan RKUPHHK-HTI.

b. Persetujuan RKPH Perum Perhutani

Persetujuan RPKH baik yang rutin maupun yang revisi pada tahun 2020 telah disetujui sebanyak 12 RPKH untuk masing-masing Divisi Regional sebagaimana Tabel 3 di bawah ini :

Tabel 3. Perkembangan RPKH (s/d Desember 2020)

No	Divisi Regional	Jumlah KPH	RPKH (unit)
1	Jawa Barat dan Banten	2	2
2	Jawa Tengah	5	5
3	Jawa Timur	5	5
Jumlah		**12**	**12**

Sumber Data : *) 1. Laporan Bulanan Perum Perhutani

c. Monitoring perkembangan tanaman pada IUPHHK-HTI dan Perum Perhutani

Realisasi tanaman pada tahun 2020 mencapai 338.128,82 Ha dari target 615.394,95 ha atau sekitar 54,95 %. Perkembangan realisasi tanaman tahun 2020 pada masing-masing provinsi sebagaimana Tabel 4 di bawah ini :

Tabel 4. Perkembangan Tanaman pada IUPHHK-HTI dan Perum Perhutani

NO	PROPINSI	Penanaman (ha)		
		Rencana	Realisasi	%
1	Aceh	0	0	0
2	Sumatera Utara	36.698,00	11,90	0,03
3	Sumatera Barat	0	0	0
4	Riau	147.384,00	110.341,58	74,87
5	Jambi	71.060,00	35.336,73	49,73
6	Sumatera Selatan	164.932,00	93.469,60	56,67
7	Lampung	4.563,00	706,09	15,47
8	Bangka Belitung	829,00	4,10	0,49
9	Kalimantan Barat	25.911,00	7.792,36	30,07
10	Kalimantan Tengah	13.080,00	2.380,70	18,20
11	Kalimantan Selatan	4.052,00	2.855,07	70,46
12	Kalimantan Timur	73.302,00	37.901,39	51,71
13	Kalimantan Utara	20.493,00	7.409,60	36,16
14	Sulawewsi Utara	0	0	0

NO	PROPINSI	Penanaman (ha)		
		Rencana	Realisasi	%
15	Gorontalo	6.949,35	77,87	1,12
16	Sulawesi Tengah	0	0	0
17	Sulawesi Tenggara	0	0	0
18	Sulawesi Selatan	2.320,00	0	0
19	Sulawesi Barat	5.629,00	10,00	0,18
20	Nusa Tenggara Barat	0	0	0
21	Nusa Tenggara Timur	0	0	0
22	Maluku	0	0	0
23	Maluku Utara	0	0	0
24	Papua Barat	0	0	0
25	Papua	1.383,00	1.142,10	82,58
26	Perum Perhutani	36.808,32	38.689,73	105,11
	Total	**615.394,95**	**338.128,82**	**54,95**

Sumber Data : *) 1. Laporan Bulanan IUPHHK-HTI, 2. Dokumen RKUPHHK-HTI, 3. Dokumen RKTUPHHK-HTI, 4. Laporan Bulanan Perum Perhutani.

d. Monitoring Produksi IUPHHK-HTI

Realisasi produksi pada tahun 2020 mencapai 45.961.678,18 m^3 dari target 49.574.161,49 M3 atau sekitar 92,71 %. Perkembangan realisasi produksi tahun 2020 pada masing-masing Provinsi sebagaimana Tabel 5 di bawah ini :

Tabel 5. Perkembangan Produksi pada IUPHHK-HTI dan Perum Perhutani

NO	PROPINSI	Produksi (m^3)		
		Rencana	Realisasi	%
1	Aceh	10.579,00	979,45	926
2	Sumatera Utara	1.379.628,87	1.327.553,54	96,23
3	Sumatera Barat	110.340,00	39.756,74	36,03
4	Riau	17.714.398,14	22.487.952,97	126,95
5	Jambi	7.767.757,49	5.862.870,22	75,48
6	Sumatera Selatan	12.856.130,82	9.697.768,72	75,43
7	Lampung	144.299,20	22.914,27	15,88
8	Bangka Belitung	499,72	499,72	100,00
9	Kalimantan Barat	1.054.606,82	710.343,94	67,36
10	Kalimantan Tengah	1.207.342,66	882.041,91	73,06

NO	PROPINSI	Produksi (m^3)		
		Rencana	Realisasi	%
11	Kalimantan Selatan	24.155,54	7.487,27	31,00
12	Kalimantan Timur	5.437.261,16	3.460.906,53	63,65
13	Kalimantan Utara	853.933,20	594.789,35	69,65
14	Sulawewsi Utara	0	0	0
15	Gorontalo	0	0	0
16	Sulawesi Tengah	0	0	0
17	Sulawesi Tenggara	0	0	0
18	Sulawesi Selatan	12.856.130,82	9.697.768,72	75,43
19	Sulawesi Barat	0	0	0
20	Nusa Tenggara Barat	0	0	0
21	Nusa Tenggara Timur	0	0	0
22	Maluku	0	0	0
23	Maluku Utara	0	0	0
24	Papua Barat	0	0	0
25	Papua	165.360,00	12.770,01	7,72
26	Perum Perhutani	818.496,35	846.375,79	103,41
	Total	**49.574.161,49**	**45.961.678,18**	**92,71**

Sumber Data : *) 1. Laporan Bulanan IUPHHK-HTI, 2. Dokumen RKUPHHK-HTI, 3. Dokumen RKTUPHHK-HTI, 4. SIPUHH Online, 5. Laporan Bulanan Perum Perhutani.

e. Monitoring Pemanfaatan Hutan Produksi Untuk Bioenergi

Sesuai Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Usaha Hutan Produksi tahun 2020 – 2024, Pemanfaatan Hutan Produksi Untuk Bioenergi pada tahun 2020 adalah seluas 3.000 Ha tetapi karena pemotongan anggaran sehingga targetnya menjadi 1.000 Ha. Realisasi Pemanfaatan Hutan Produksi Untuk Bioenergi seluas 1.200 Ha (120%).

f. Monitoring Areal Budidaya Yang Dikelola Bermitra Dengan Masyarakat

Sesuai Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Usaha Hutan Produksi tahun 2020 - 2024, luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat pada tahun 2020 adalah seluas 65.000 ha tetapi karena pemotongan anggaran sehingga targetnya menjadi seluas 10.000 ha. Realisasi luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat seluas 10.800 ha atau 108%.

3. Subdit Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam

Dalam rangka kelancaran tugas di bidang Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penilaian kinerja usaha hutan alam;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian kinerja usaha hutan alam;
c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, di bidang penilaian kinerja usaha hutan alam;
d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja usaha hutan alam; dan
e. Penyiapan bahan pengelolaan informasi kinerja dan pengambilalihan saham usaha pemanfaatan hutan alam.

Tugas umum pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh Subdit Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam, antara lain :

a. Perkembangan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
   1) Kegiatan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) selama periode tahun 2020 telah dilakukan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) sebanyak 8 UM (Unit Managemen).
   2) Jumlah IUPHHK-HA yang izin usahanya masih berlaku per 31 Desember 2020 sebanyak 257 UM dengan rincian sebagai berikut :
      - UM Aktif berkinerja = 199 UM,
      - UM Tidak Aktif = 58 UM,
   3) Jumlah IUPHHK-HA yang telah dilakukan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) oleh Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) sampai dengan 31 Desember 2020 sebanyak 209 UM seluas 18.733.432 Ha, dengan rincian sebagai berikut :

- Baik = 109 UM, seluas = 9.916.282 Ha
- Sedang = 49 UM, seluas = 2.775.244 Ha
- Buruk = 20 UM, seluas = 885.924 Ha
- Berakhir = 15 UM, seluas = 1.233.360 Ha
- Dibekukan = 1 UM, seluas = 177.900 Ha
- Proses = 2 UM, seluas = 60.380 Ha
- Dicabut = 13 UM, seluas = 937.590 Ha

4) Jumlah IUPHHK-HA yang telah dilakukan verifikasi legalitas kayu (LK) oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebanyak 116 UM, seluas 6.971.368 Ha, dengan rincian sebagai berikut :

- Memenuhi = 28 UM, seluas = 1.588.138 Ha
- Dibekukan = 5 UM, seluas = 247.305 Ha
- Dicabut = 8 UM, seluas = 374.398 Ha
- Dimatikan = 24 UM, seluas = 1.870.109 Ha
- Berakhir = 50 UM, seluas = 2.818.060 Ha
- Tidak Memenuhi = 1 UM, seluas = 73.375 Ha

b. Perkembangan Peringatan Dan Sanksi Pencabutan IUPHHK-HA

1) Tidak ada IUPHHK-HA yang diberi peringatan selama tahun 2020.
2) Jumlah IUPHHK-HA yang diberi sanksi pencabutan pada tahun 2020, sebanak 1 UM, yaitu a.n IUPHHK-HA PT. Permata Borneo Abadi di Provinsi Kalimantan Utara (No. SK. 222/Menlhk/Setjen/HPL.1/5/2020 tanggal 12 Mei 2020)

c. Perkembangan Investasi IUPHHK-HA

Perkembangan investasi IUPHHK-HA per 31 Desember 2020 total asset sebesar Rp. 14.938.671.026.736,- dan $ 9.655.024.601,- .

4. Subdit Penilaian Kinerja Usaha Hutan Tanaman

Dalam rangka kelancaran tugas di bidang Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penilaian kinerja usaha hutan tanaman;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian kinerja usaha hutan tanaman;
c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, di bidang penilaian kinerja usaha hutan tanaman;
d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja usaha hutan tanaman; dan
b. Penyiapan bahan pengelolaan informasi kinerja dan pengambilalihan saham usaha pemanfaatan hutan tanaman.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Sub Direktorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Tanaman bertindak selaku Koordinator Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi/Pelaporan dengan tugas :

a. Membantu Direktur untuk mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi/laporan kegiatan program pembangunan Ditjen PHPL sekaligus berfungsi sebagai kontak person dengan Sekditjen PHPL.
b. Melaporkan hasil-hasil koordinasi kegiatan kepada Direktur masing-masing Direktorat
c. Melaksanakan tugas koordinator dengan seksama dan tanggung-jawab

Sub Direktorat Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman juga memiliki tugas tambahan sebagai berikut :

a. Monitoring dan evaluasi data PHPL
b. Monitoring dan evaluasi data Alih Saham
c. Monitoring dan evaluasi data Penataan Batas IUPHHK-HT
d. Monitoring dan evaluasi pemberian peringatan dan pencabutan IUPHHK-HT

e. Monitoring dan evaluasi data investasi IUPHHK-HT

f. Tindak lanjut target Rencana Aksi Inpres No. 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut UKP4 terkait MORA2P3A13

g. Monitoring dan evaluasi areal terbakar pada IUPHHK-HT sesuai PermenLHK Nomor P.77/Menlhk-Setjen/2015

Adapun Hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Subdit Penilaian Kinerja Usaha Hutan Tanaman adalah sebagai berikut :

a. Obrik Evaluasi Kinerja IUPHHK-HT

Tabel 6. Obrik Evaluasi Kinerja IUPHHK-HT

No.	Nama IUPHHK-HTI	Provinsi
1.	PT. Sampe Wali	Sultra
2.	PT. Sylvaduta Corporation	Kaltim

b. Obrik Pembinaan Peningkatan Kinerja IUPHHK-HT / Perhutani

Tabel 7. Obrik Pembinaan Peningkatan Kinerja IUPHHK-HT / Perhutani

No.	Nama IUPHHK-HTI	Provinsi
1.	Perum Perhutani Divreg Jatim	Jatim
2.	Perum Perhutani Divreg Jabar Banten	Jabar
3.	Perum Perhutani Divreg Jateng	Jateng
4.	PT. Istana Kawi Kencana	Babel

c. Obrik HTI skema P. 39/Menhut-II/2008

Tabel 8. Obrik HTI skema P. 39/Menhut-II/2008

No.	Nama IUPHHK-HTI	Provinsi
1.	PT. Diva Pesona Persada	Kaltim
2.	PT. Amal Nusantara	Sulbar

d. Obrik verifikasi areal terbakar pada IUPHHK-HTI

Tidak ada verifikasi areal terbakar pada IUPHHK HTI pada Tahun 2020

e. Penilaian Kinerja PHPL UPHHK HT:

1) IUPHHK-HT yang memperoleh resertifikasi PHPL sebanyak **5** unit manajemen dan sertifikasi awal PHPL sebanyak **3** unit manajemen.
2) IUPHHK-HT yang memperoleh sertifikat LK sebanyak **2** unit manajemen.

Data hasil monitoring dan evaluasi Direktorat Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah IUPHHK-HT yang izin usahanya masih berlaku per 31 Desember 2020 sebanyak 293 UM dengan rincian sebagai berikut :

- Aktif berkinerja = 236 UM,
- Didorong meningkatkan kinerja = 55 UM,
- Evaluasi P.39/Menhut-II/2008 = 2 UM,

b. PHPL dan VLK

Dari 293 IUPHHK-HT definitif s/d tahun 2020, **117** unit telah bersertifikasi PHPL dan **3** unit KPH Perum Perhutani telah bersertifikat PHPL dan **22** unit telah bersertifikasi SLK, dengan rincian sebagai berikut :

- Baik = 96 UM, seluas = 5.562.850 Ha
- Sedang = 21 UM, seluas = 928.554 Ha
- Buruk = 0 UM, seluas = 0 Ha
- Berakhir = 0 UM, seluas = 0 Ha
- Dibekukan = 0 UM, seluas = 0 Ha
- Proses = 0 UM, seluas = 0 Ha
- Dicabut = 0 UM, seluas = 0 Ha
- SLK = 22 UM, Seluas = 602.086 Ha

c. Perkembangan Tata Batas IUPHHK-HT

1) Belum Tata Batas sebanyak **62** unit
2) Sudah Tata Batas sebanyak **231** unit terdiri dari Pengajuan 4 unit, Pembahasan 24 unit, Pedoman 31 unit, Instruksi 33 unit, pelaksanaan 5 unit Temu Gelang 44 Unit dan Penetapan 90 unit.

d. Perkembangan Pencabutan Izin dan Pemberian Peringatan IUPHHK-HT

1) Pencabutan, sebanyak 4 Unit
2) Peringatan
   - SP 1 : 1 unit
   - SP 2 : 1 unit
   - SP 3 : 8 unit
3) Pembatalan Peringatan
   - SP 1 : 1 unit
   - SP 2 : 1 unit
   - SP 3 : 2 unit

1. Bidang Tata Usaha Direktorat Usaha Hutan Produksi

Jumlah pegawai lingkup Direktorat Usaha Hutan Produksi sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang PNS yang terdiri dari :

a. Pejabat Eselon II : 1 orang
b. Pejabat Eselon III : 4 orang (3 Pensiun)
c. Pejabat Eselon IV : 9 orang (1 Meninggal)
d. S t a f : 26 orang (PNS)
e. Fungsional : 10 orang (PNS)

dan 6 (enam) orang tenaga kontrak sebagaimana Tabel 9.

Tabel 9. Jumlah Pegawai Lingkup Direktorat Usaha Hutan Produksi Tahun 2020

No.	Pendidikan	Direktorat	RKUPHA	RKUP HT	PKU HA	PKU HT	TU	Jml	Persentase (%)
1.	S 3	-	-	-	2	-	-	2	3,92
2.	S 2	1	5	5	2	4	1	18	35,29
3.	S 1	-	5	4	4	4	3	20	39,21
4.	D 3	-	-	-	1	1	2	4	7,84
5.	SLTA	-	-	1	-	-	7	7	13,72
6.	SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	SD	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1	10	10	9	9	12	51	100,00

Adapun jumlah Pegawai lingkup Direktorat Usaha Hutan Produksi berdasarkan Golongan dan pangkat pada Tahun 2020, sebagaimana tabel 2.

Tabel 10. Jumlah Pegawai Lingkup Direktorat Usaha Hutan Produksi 2020 berdasarkan Golongan Pangkat

No.	Golongan	Direktorat	RKU PHA	RKU PHT	PKU HA	PKU HT	TU	Jml	Persentase (%)
1.	IV/d	1	-	-	-	-	-	1	2,08
2.	IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	IV/b	-	1	1	1	1	-	4	8,33
4.	IV/a	-	2	1	1	1	1	6	12,50
5.	III/d	-	1	2	4	2	2	11	22,92
6.	III/c	-	2	4	1	2	2	11	22,92
7.	III/b	-	1	2	3	1	-	7	14,58
8.	III/a	-	2	-	1	2	1	6	12,50
9.	II/d	-	-	-	-	-	1	1	2,08
10.	II/c	-	-	-	-	-	1	1	2,08
11.	II/b	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1	9	10	11	9	8	51	100,00

Jumlah pegawai lingkup Direktorat Usaha Hutan Produksi yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan sampai dengan tahun 2020, sebagaimana tabel 3.

Tabel 11. Jumlah Pegawai Lingkup Direktorat Usaha Hutan Produksi Tahun 2020 yang mengikuti Diklat Penjenjangan.

No.	Diklat Penjenjangan	Direktur	RKUPHA	RKUPHT	PKUHA	PKUHT	TU	Jumlah	Ket.
1.	Lemhanas	1	-	-	-	-	-	1	
2.	PIM I (SPATI)	1	-	-	-	-	-	1	
3.	PIM II (SPAMEN)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	PIM III (SPAMA)	-	1	1	1	1	-	4	
5.	PIM IV (ADUM)	-	2	2	1	2	1	8	
Jumlah		2	3	3	2	3	1	14	

Pada tahun 2020 bidang Tata Usaha mengelola surat masuk dan surat keluar

dengan perincian :

1) Surat masuk

Jumlah surat masuk ke Direktorat Usaha Hutan Produksi pada tahun 2020 dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Agenda undangan = 807 undangan
- Sistem Informasi Kearsipan (SIK) = 4.912 surat

2) Surat keluar

Jumlah surat keluar dari Direktorat Usaha Hutan Produksi pada tahun 2020 dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Nota Dinas = 952 surat
- Surat biasa = 1.355 surat
- Surat Perintah Tugas = 655 surat
- Surat undangan = 531 surat

2. Realisasi Keuangan dan Capaian Sasaran Kinerja

Unsur keuangan dalam rangka mendukung tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan hutan produksi pada Direktorat Usaha Hutan Produksi

adalah alokasi dana yang tertuang dalam DIPA Satker Direktorat Usaha Hutan Produksi Tahun 2020 dengan Nomor : **SP DIPA.029-03.1.465007/2020.** DIPA satker Direktorat Usaha Hutan Produksi mengalami 2 (dua) kali revisi sebagai berikut:

1) DIPA Awal Nomor SP DIPA-029.03.1.465007/2020 tanggal 5 Desember 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.076.000.000,-
2) DIPA Revisi 1 Nomor SP DIPA-029.03.1.465007/2020 tanggal 3 Juni 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.099.750.000,-
3) DIPA Revisi 2 (Kanwil) Nomor SP DIPA-029.03.1.465007/2020 tanggal 15 Oktober 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.140.311.000,-

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.140.311.000,- Pencapaian Kinerja Kegiatan Direktorat Usaha Hutan Produksi Tahun 2020 berdasarkan serapan anggaran (Input) terealisasi sebesar Rp. 4.090.875.233,- (98.81 %).

Dari realisasi anggaran Direktorat Usaha Hutan Produksi tahun 2020 tersebut di atas, diuraikan realisasi anggaran persubdit sebagai berikut :

1) Jumlah IUPHHK-HA Yang Berkegiatan

   Secara keseluruhan dari total anggaran yang dikelola oleh Sub Direktorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Alam dan Sub Direktorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam tahun 2020, sebesar Rp.836.904.000,- terealisasi sebesar Rp. 831.455.733,- (99,24 %).

2) Jumlah IUPHHK-HT yang Menanam

   Secara keseluruhan dari total anggaran yang dikelola oleh Sub Direktorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman dan Sub Direktorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Tanaman Tahun 2020 sebesar Rp. 1.684.372.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.654.829.741,- (98.65 %).

3) Hutan Alam Yang Dibangun dengan Silvikultur Intensif

   Secara keseluruhan dari total anggaran yang dikelola oleh Sub Direktorat Rencana Kerja dan Produksi Usaha Hutan Alam Tahun 2020 sebesar Rp. 1.394.304.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.382.877.259,- (99,24 %).

4) Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi untuk Bioenergi

Secara keseluruhan dari total anggaran yang dikelola oleh Sub Direktorat Rencana Kerja dan Produksi Usaha Hutan Tanaman Tahun 2020 sebesar Rp.73.608.000,- terealisasi sebesar Rp. 72.771.500,- (99,46 %).

5) Areal Tanaman Budidaya yang Dikelola Bermitra dengan Masyarakat

Secara keseluruhan dari total anggaran yang dikelola oleh Sub Direktorat Rencana Kerja dan Produksi Usaha Hutan Tanaman Tahun 2020 sebesar Rp. 151.123.000,- terealisasi sebesar Rp. 148.941.000,- (99,17 %).

6) Layanan Perkantoran

Secara keseluruhan dari total anggaran dikeloa oleh Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Usaha HUtan Produksi Tahun 2020 sebesar Rp. 2.076.970.000,- terelisasi sebesar Rp. 2.075.291.028,- (99,17 %).

Pencapaian realisasi anggaran per indikator keluaran sebagaimana tabel 12 di bawah ini.

Tabel 12.Pencapaian realisasi anggaran per indikator keluaran

NO	KODE	URAIAN KEGIATAN	PAGU (RP.)	REALISASI (RP.)	PROSENTASE (%)
1.	5398.051	Jumlah IUPHHK-HA yang Berproduksi	836.904.000	831.455.733	99.75
2.	5398.052	Jumlah IUPHHK-HT yang Menanam	1.684.372.000	1.654.829.741	98.63
3.	5398.053	Hutan di Kalimantan yang dibangun dengan silvikultur intensif	1.394.304.000	1.382.877.259	99,18
4.	5398.054	Usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi	73.608.000	72.771.500	98.86
5.	5398.055	Areal Tanaman Budidaya yang Dikelola Bermitra dengan Masyarakat	151.123.000	148.941.000	99,24
6.	5396	Layanan Perkantoran	2.076.970.000	2.075.291.028	99.17
TOTAL			4.140.311.000	4.090.875.233	98.81

Pencapaian kinerja kegiatan berdasarkan target dan realisasi disajikan pada tabel 13 berikut:

Tabel 13. Tingkat Pencapaian Kinerja Kegiatan

NO	KEGIATAN / IKK / OUTPUT	TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA					
		TARGET		REALISASI		%	
		Anggaran	Output	Anggaran	Output	Angg.	Output
PENINGKATAN USAHA HUTAN PRODUKSI		4.140.311.000		4.090.875.233		98,81	
1.	IUPHHK-HA dan HT yang aktif (Unit)	1.062.338.000	360 Unit	1.058.323.751	435 Unit	99,62	120,83
2.	Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi (ha)	1.394.304.000	125.000 ha	1.382.877.259	353.623 ha	99,18	282,90
3.	Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi (ha)	73.608.000	1.000 ha	72.771.500	1.200 ha	98,86	120,00
4.	Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi (juta m^3)	451.516.000	30.000.000 m^3	448.401.496	52.150.593 m^3	99,30	173,84
5.	Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat	667.023.000	10.000 ha	642.391.690	10.800 ha	96,31	108,00
6	IUPHHK-HA dan HT yang mendapat sertifikat kinerja PHPL kategori sedang-baik (Unit)	491.522.000	267 Unit	486.109.537	275 Unit	98,90	103,00

Kegiatan secara fisik pada Direktorat Usaha Hutan Produksi telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian kinerja sasaran (target dan realisasi) berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebesar 151,43 % dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 14. Tingkat Pencapaian Sasaran

NO.	KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TINGKAT PENCAPAIAN SASARAN (%)	
		TARGET	REALISASI
1.	IUPHHK-HA dan HT yang aktif (Unit)	100	120,83
2.	Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi (ha)	100	282,90
3.	Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi (ha)	100	120,00

NO.	KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TINGKAT PENCAPAIAN SASARAN (%)	
		TARGET	REALISASI
4.	Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi (juta m^3)	100	173,84
5.	Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat	100	108,00
6	IUPHHK-HA dan HT yang mendapat sertifikat kinerja PHPL kategori sedang-baik (Unit)	100	103,00

BAB III
ARAHAN KEBIJAKAN

Memperhatikan Perpres No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Renstra Kernen LHK, Ditjen PHPL, dan Dit. Usaha Hutan Produksi 2020 – 2024 serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SE.5/PHPL/SET/REM.1/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan DIPA APBN Tahun Anggaran 2021 Lingkup Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, arah kebijakan Dit. UHP tahun 2021 adalah mendukung keberhasilan pembangunan kehutanan di hutan produksi, sesuai dengan program pembangunan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dalam APBN Tahun Anggaran 2021 yaitu Program "Pengelolaan Hutan Berkelanjutan", dengan sasaran program :

1. Meningkatnya produktivitas hutan produksi;
2. Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBP kehutanan;
3. Meningkatkan nilai ekspor hasil hutan kayu;
4. Meningkatnya ragam usaha kehutanan;
5. Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusahaan hutan;
6. Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan;
7. Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak;
8. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan berpelayanan prima pada Ditjen PHPL.

Adapun indikator kinerja program :

1. Sasaran Program Pertama (SP-1) yaitu Meningkatnya produktivitas hutan produksi dengan indikator kinerja program (IKP) adalah Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi (ha),
2. Sasaran Program Kelima (SP-5) yaitu Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusahaan hutan dengan indikator kinerja program (IKP) adalah akses legal bagi masyarakat pada hutan produksi meningkat (ha)

3. Sasaran Program Ketujuh (SP-7) yaitu Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak dengan indikator kinerja program (IKP), adalah Unit Manajemen bersertifikat PHPL Sedang dan Baik meningkat

Kegiatan, sasaran dan indikator kinerja program kegiatan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Periode Tahun 2020-2024 di bawah tanggung jawab Direktorat Usaha Hutan Produksi sampai dengan Tahun 2021 sebagaimana Tabel 15 :

Tabel 15. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Usaha Hutan Produksi

No.	Output	Volume
1.	IUPHHK-HA dan HT yang aktif (Unit)	391 juta m^3
2.	Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi (ha)	688.000 ha
3.	Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi (ha)	6.000 ha
4.	Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat	30.000 ha
5.	Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi (juta m3)	97 juta m3
6.	IUPHHK-HA dan HT yang mendapat sertifikat kinerja PHPL kategori sedang-baik (Unit)	340 unit

Potensi dan permasalahan bidang pemanfaatan hutan produksi, berdasarkan hasil bedah kinerja, kegiatan pengawasan dan pengendalian, workshop, informasi para pihak, diskusi kelompok (Tim Evaluasi) dituangkan dalam tabel 16 berikut :

Tabel 16. Permasalahan IUPHHK-HA dan Arah Kebijakan

No.	Permasalahan	Arah Kebijakan
1.	Kinerja IUPHHK-HA untuk mewujudkan PHPL belum optimal (al. Biaya produksi tinggi, konflik tenurial dan sosial, harga kayu log fluktuatif dan aksesibilitas jauh)	a. Penyederhanaan regulasi, aplikasi pelaporan kinerja IUPHHK b. Supervisi/Pembinaan Kinerja dan penertiban pemanfaatan hutan.
2.	Rendahnya produktivitas kayu bulat dan banyaknya areal non hutan di kawasan IUPHHK- HA	Penerapan sistem Silvikultur dengan melibatkan pendampingan oleh Pakar

No.	Permasalahan	Arah Kebijakan
3.	Realisasi produksi, pembinaan hutan dan kelola sosial belum optimal dilakukan.	a. Intervensi regulasi dan penyempurnaan sistem monitoring dan evaluasi. b. Supervisi dan koordinasi para pihak baik pemerintah maupun swasta.
4.	Perlindungan dan pengamanan hutan (perambahan dan kebakaran hutan) pada IUPHHK-HA	Pencegahan secara dini dengan melibatkan semua stake holder bersama-sama dengan elemen pemerintah pusat dan daerah (BMG)
5	Belum adanya evaluasi keberhasilan pelaksanaan SILIN dan sanksi bagi pelaksana SILIN yang tidak melaksanakan kegiatan penanaman SILIN di arel kerjanya.	Penyusunan NSPK tentang evaluasi keberhasilan tanaman SILIN dan NSPK sanksi bagi IUPHHK-HA yang tidak melaksanakan SILIN serta penyusunan NSPK SILIN untuk jenis merbau untuk wilayah Indonesia Bagian Timur
6	Keterlambatan IUPHHK-HA dalam melaksanakan IHMB dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan pasar kayu bulat mengalami kelesuan sehingga para pemegang IUPHHK-HA menunda pelaksanaan IHMB yang membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak dan biaya yang tinggi	Penyusunan metode alternatif IHMB yang lebih cepat, mudah dan mengurangi resiko

Tabel 17. Permasalahan IUPHHK-HT dan Arah Kebijakan IUPHHK-HT

No.	Permasalahan	Arah Kebijakan
1.	Konflik tenurial dan sosial tinggi (perambahan, tumpang tindih areal), kelola sosial belum maksimal.	a. Fasilitasi konflik dan kelola sosial dengan melibatkan para pihak yang terkait, dan Penyerderhanaan regulasi. b. Supervisi/Pembinaan Kinerja, kemitraan dan optimalisasi pemanfaatan ruang dalam RKUPHHK-HT.
2.	Penataan batas yang belum temu gelang, terdapat IUPHHK-HT yang belum mengajukan tatabatas.	a. Percepatan penyelesaian tatabatas dan telah dibuat edaran untuk penyelesaian tata batas. b. Monitoring tatabatas.
3.	Realisasi produksi, pembuatan tanaman swakelola dan kemitraan, pembinaan hutan belum optimal dilakukan	a. Intervensi regulasi, diversifikasi produk hasil hutan dan penyempurnaan sistem monitoring dan evaluasi. b. Supervisi dan koordinasi para pihak baik pemerintah maupun swasta.
4.	Perlindungan dan pengamanan hutan (perambahan dan kebakaran hutan)	Pencegahan secara dini dengan melibatkan semua stake holder bersama-sama dengan elemen pemerintah pusat dan daerah.
5.	Harga kayu Hutan tanaman rendah, khususnya HTInon grup.	Koordinasi dengan Kemndag terkait intervensl kebijakan harga kayu, memberikan kesempatan untuk ekspor kayubulat tanaman.
6.	Kebijakan gambut dalam IUPHHK-HT	Revisi RKUPHHK-HT

BAB IV
RENCANA KEGIATAN

A. PROGRAM DAN SASARAN PROGRAM

Sejalan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024, program yang akan dilakukan Direktorat Jenderal PHPL adalah Program "Pengelolaan Hutan Berkelanjutan" dengan sasaran program yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya produktivitas hutan produksi.
2. Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBP Kehutanan.
3. Meningkatnya nilai ekspor hasil hutan kayu.
4. Meningkatnya ragam usaha kehutanan.
5. Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusahaan hutan produksi.
6. Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan.
7. Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak.
8. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel , responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHPL.

Untuk dapat melaksanakan program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari telah menetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut :

1. Unit Manajemen hutan yang menanam meningkat setiap tahunnnya sampai dengan tahun 2024 sebanyak 439 Unit
2. Iuran Kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi meningkat sebesar 16,028 Trilyun sampai dengan tahun 2024

3. Produksi hasil hutan kayu meningkat sebesar 269 juta m3 sampai dengan Tahun 2024;
4. Nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu meningkat dengan target USD 49 Milyar hingga tahun 2024
5. Unit manajemen yang mengembangkan Multi Usaha kehutanan (unit) dengan target sebanyak 25 Unit hingga tahun 2024
6. Akses legal bagi masyarakat pada pengusahaan hutan produksi meningkat dengan target seluas 65.000 ha hingga tahun 2024
7. Investasi baru pada hutan produksi (unit) meningkat dengan target sebanyak 30 Unit hingga tahun 2024
8. Unit manajemen bersertifikat PHPL sedang dan baik meningkat dengan target sebanyak 385 Unit hingga tahun 2024
9. Nilai SAKIP Ditjen PHPL meningkat dengan target bernilai 83 poin hingga tahun 2024.

Untuk menunjang program Direktorat Jenderal PHPL, maka Sasaran Program yang terkait langsung dengan Direktorat Usaha Hutan Produksi adalah :

1. **Meningkatnya produktivitas hutan produksi**, dengan **indikator kinerja program (IKP) adalah Unit Manajemen hutan yang menanam meningkat setiap tahunnnya** sampai dengan tahun 2024 sebanyak 439 Unit, sedangkan untuk indikator kinerja kegiatan (IKK), meliputi:
   a. IUPHHK-HA dan HT yang aktif berdasarkan volume produksi hasil hutan kayu dan rencana kerja usaha (Rencana Kerja Usaha dan Rencana Kerja Tahunan) dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 439 Unit;
   b. Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi. Penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi dilakukan oleh Unit Manajemen IUPHHK-HTI/HTR/HA/RE/HTR, Perhutani dan KPH dengan target hingga tahun 2024 seluas 1,97 juta ha;
   c. Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi dengan target hingga tahun 2024 seluas 15.000 ha;
2. **Meningkatnya kontribusi Iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBP Kehutanan**,

dengan **indicator kinerja program (IKP) adalah Produksi hasil hutan kayu meningkat setiap tahunnya sampai dengan tahun 2024 sebanyak 269 Juta m^3**, sedangkan untuk indikator kinerja kegiatan (IKK), adalah Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi meningkat dengan target hingga tahun 2024 sebesar 269 juta m3.

3. **Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusahaan hutan**, dengan **indikator kinerja program (IKP) adalah Akses legal bagi masyarakat pada pengusahaan hutan produksi meningkat sampai dengan 65.000 ha hingga tahun 2024**, dengan IKK. Indikator kinerja kegiatan (IKK) adalah Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat dengan target hingga tahun 2024 seluas 65.000 ha.
4. **Meningkatnya kinerja pengelola hutan**, **dengan indikator kinerja program (IKP), adalah Unit Manajemen bersertifikat PHPL Sedang dan Baik meningkat sampai dengan 385 Unit hingga tahun 2024**, sedangkan untuk indikator kinerja kegiatan (IKK) adalah Jumlah IUPHHK-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL Sedang dan Baik dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 385 Unit Manajemen;

B. KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN

IKP Direktorat Jenderal PHPL yang menjadi tanggung jawab Direktorat UHP adalah :

1. Meningkatnya produktivitas hutan produksi
2. Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBP kehutanan
3. Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusahaan hutan
4. Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak,

Maka untuk mendukung IKP tersebut ditetapkan kegiatan Direktorat UHP Tahun 2020-2024 yaitu kegiatan Peningkatan Usaha Hutan Produksi dengan sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang ditetapkan sampai dengan tahun 2021
Sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya produktivitas hutan produksi

IKK

1. IUPHHK-HA dan HT yang aktif berdasarkan volume produksi hasil hutan kayu dan rencana kerja usaha (Rencana Kerja Usaha dan Rencana Kerja Tahunan) sebesar 391 unit
2. Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi sebesar 688.000 ha
3. Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi seluas 6.000 ha

Sasaran 2 : Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBP kehutanan

IKK

1. Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi sebesar 97 juta Ha.

Sasaran 3 : Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusahaan hutan

IKK

1. Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat seluas 30.000 ha

Sasaran 4 : Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak

IKK

1. Jumlah IUPHHK-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL Sedang dan Baik seluas 340 unit

C. ANGGARAN

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan peningkatan hutan produksi tahun 2021 Direktorat Usaha Hutan Produksi memerlukan dukungan anggaran untuk pembiayaan menjalankan tugas dan fungsinya yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021. Anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2021 adalah Rp. 14.744.555.000,- dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 18. Kegiatan peningkatan hutan produksi tahun 2021 Direktorat Usaha Hutan Produksi

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	NSPK Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi 3 Rancangan	1.185.263.000
3.	Layanan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan seluas 20 Juta m3	2.771.796.000
5.	Pembinaan Teknis/Supervisi Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi seluas 20 Ha	10.787.496.000
	Jumlah	**14.744.555.000**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Direktorat Usaha Hutan Produksi Tahun 2021 ini merupakan arahan dan acuan pelaksanaan tugas satuan kerja Direktorat Usaha Hutan Produksi. Setiap unit kerja diharapkan segera menyiapkan dan menyusun langkah-langkah untuk pelaksanaan kegiatan agar apa yang direncanakan dalam rencana kerja ini dapat terwujud secara optimal, dengan memperhatikan indikator-indikator kegiatan yang ditetapkan sebagai salah satu ukuran pencapaian kinerja Direktorat Usaha Hutan Produksi.

Keberhasilan pelaksanaan rencana kerja Direktorat Usaha Hutan Produksi sangat tergantung pada kesungguhan jajaran Direktorat Usaha Hutan Produksi serta peran aktif masyarakat dalam mengimplementasikan rencana-rencana kegiatan yang ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Renstra Direktorat Usaha Hutan Produksi dan Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dengan tersusunnya rencana kerja Direktorat Usaha Hutan Produksi Tahun 2021 ini, dapat dijadikan pedoman dan arahan pelaksanaan kegiatan, untuk mencapai target yang telah disusun RPJMN, Renstra maupun Renja Tahun 2021.

LAMPIRAN

Tabel 19.Tabel Rencana Kegiatan dan Anggaran Direktorat Usaha Hutan Produksi Tahun 2021

Rencana Kegiatan	Output	Outcome	Volume	Rencana Anggaran
NSPK Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi - Pembahasan dan penyusunan NSPK Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi - Knsultasi publik NSPK Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi	Tersusunnya NSPK Usaha Pemanvaatan Hutan Produksi			**1.185.263.000** 763.510.000 421.753.000
Layanan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan - Layanan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Hutan Alam - Pembinaan Teknis/Supervisi Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam	1. Terimplementasinya pelaksanaan sistem silvikultur sesuai RKUPHHK 2. Terpantaunya produksi kayu oleh pemegang IUPHHK dan 3. Tertanganinya konflik	1. Meningkatnya produktifitas hutan produksi, 2. Meningkatnya investasi dan serapan tenaga kerja pada IUPHHK 3. Tercapainya peningkatan produksi kayu dari hutan produksi		**2.771.796.000** 1.154.272.000 1.775.998.000
Pembinaan Teknis/Supervisi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi - Pembinaan Teknis/Supervisi Kinerja Usaha Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Alam - Pembinaan Teknis/Supervisi Kinerja Usaha				**10.787.496.000** 1.775.998.000 2.171.388.000

Rencana Kegiatan	Output	Outcome	Volume	Rencana Anggaran
Pemanfaatan Kayu Pada Tanaman - Pembinaan Teknis/Penerapan SILIN/RIL - Pembinaan Teknis Supervisi Mitigasi Karhutla				6.440.060.000 400.050.000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (029) KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UNIT ORG (03) Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
UNIT KERJA (465007) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
ALOKASI Rp.145,797,956,000

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
522141	Belanja Sewa			13,500,000		PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Sewa Kendaraan dalam rangka praktek lapangan	15.0 unit	900,000	13,500,000		
522151	Belanja Jasa Profesi			12,260,000		PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Honorarium Pengajar	29.0 ojp	300,000	8,700,000		
	- Honorarium Pendamping Pengajar	39.0 ojp	40,000	1,560,000		
	- Honorarium Penceramah (Es I)	2.0 ojp	1,000,000	2,000,000		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			5,340,000		PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- perjalanan dinas dalam rangka penjajakan lokasi praktek	6.0 ot	890,000	5,340,000		
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			380,000,000		PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Akomodasi Fullboard Peserta, Panitia dan Pengajar di Bogor (4 Fb x 50 Orang)	200.0 op	720,000	144,000,000		
	- Bantuan Uang transport Peserta	50.0 ok	4,000,000	200,000,000		
	- Uang Harian Peserta (50 orang x 4 hari)	200.0 OH	150,000	30,000,000		
	- Uang transport panitia	5.0 oh	300,000	1,500,000		
	- Uang transport pendamping pengajar	15.0 oh	300,000	4,500,000		
B	*Pendampingan Implementasi Kegiatan Agroforestry di KPHP (10 lokasi)*			*179,125,000*		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			179,125,000		PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- perjalanan dinas pra kondisi, supervisi, dan evaluasi pembangunan agroforestry (10 lokasi)	25.0 ot	7,165,000	179,125,000		
5398	Peningkatan Usaha Hutan Produksi			14,744,555,000		
5398.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3.0 NSPK		1,185,263,000		
	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT					
5398.AFA.001	**NSPK Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi**	**3.0 Rancangan NSPK**		**1,185,263,000**		
051	**Pembahasan dan Penyusunan NSPK (3 NSPK)**			**763,510,000**	**U**	
A	*TANPA SUB KOMPONEN*			*763,510,000*		
521211	Belanja Bahan			3,865,000		PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Bahan Operasional Kegiatan	1.0 KEG	3,865,000	3,865,000		
521211	Belanja Bahan			25,645,000		RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Bahan Operasional Kegiatan	2.0 KEG	3,950,000	7,900,000		
	- Konsumsi rapat	273.0 OK	65,000	17,745,000		
522151	Belanja Jasa Profesi			126,000,000		PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Honor Narasumber /Pembahas/Pakar Praktisi/Profesional Kegiatan di dalam negeri	90.0 OJ	1,400,000	126,000,000		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			80,000,000		PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Perjalanan dinas dalam rangka penyusunan NSPK	10.0 OT	8,000,000	80,000,000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (029) KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UNIT ORG (03) Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
UNIT KERJA (465007) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
ALOKASI Rp.145,797,956,000

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			528,000,000		RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penyusunan NSPK	66.0 OT	8,000,000	528,000,000		
052	**Konsultasi Publik (3 NSPK)**			**421,753,000**	**U**	
A	*TANPA SUB KOMPONEN*			*421,753,000*		
521211	Belanja Bahan			29,031,000		PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Bahan Operasional Kegiatan	1.0 KEG	4,431,000	4,431,000		
	- Konsumsi rapat	40.0 OK	65,000	2,600,000		
	- Personal Use	60.0 Org	200,000	12,000,000		
	- Pencetakan buku manual di lapangan	200.0 Eks	50,000	10,000,000		
521211	Belanja Bahan			49,322,000		RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Bahan Operasional Kegiatan	3.0 KEG	3,274,000	9,822,000		
	- Pencetakan buku manual di lapangan	70.0 Eks	50,000	3,500,000		
	- Personal Use	180.0 Org	200,000	36,000,000		
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			4,800,000		RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Honor Ketua Panitia	3.0 OK	400,000	1,200,000		
	- Honor Anggota Panitia	12.0 OK	300,000	3,600,000		
522151	Belanja Jasa Profesi			20,400,000		PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Honor Narasumber /Pembahas/Pakar Praktisi/Profesional Kegiatan di dalam negeri	16.0 OJ	1,100,000	17,600,000		
	- Honorarium Moderator	4.0 OK	700,000	2,800,000		
522151	Belanja Jasa Profesi			10,200,000		RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Honor Narasumber /Pembahas/Pakar Praktisi/Profesional Kegiatan di dalam negeri	8.0 OJ	1,100,000	8,800,000		
	- Honorarium Moderator	2.0 OK	700,000	1,400,000		
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			154,000,000		PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Paket Meeting Fullday (Bogor)	130.0 OH	1,000,000	130,000,000		
	- Uang Saku Fullboard (Bogor)	120.0 OH	150,000	18,000,000		
	- Transport Panitia	10.0 OH	600,000	6,000,000		
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			154,000,000		RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Paket Meeting Fullday (Bogor)	130.0 OH	1,000,000	130,000,000		
	- Uang Saku Fullboard (Bogor)	120.0 OH	150,000	18,000,000		
	- Transport Panitia	10.0 OH	600,000	6,000,000		
5398.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1.0 Lembaga		0		
	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT					
5398.BIC.001	**Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi yang diawasi dan dikendalikan**	**1.0 ha**		**0**		
051	**Pengawasan dan Pengendalian Produksi Hasil Hutan Kayu, Luas Penanaman, Kemitraan Kehutanan dan**			**0**	**U**	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (029) KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UNIT ORG (03) Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
UNIT KERJA (465007) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
ALOKASI Rp.145,797,956,000

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
	penanganan Karhutla					
				0		
				0		
	(KPPN.-)					
5398.QAC	Pelayanan Publik kepada badan usaha	20.0 Badan usaha		2,771,796,000		
	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT					
5398.QAC.001	**Layanan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan**	**20.0 Juta m3**		**2,771,796,000**		
051	**Layanan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Hutan Alam**			**1,154,272,000**	**U**	
A	*Monitoring Implementasi RKUPHHK-HA/RKTUPHHK-H/IPK/IPPKH/Kelola Sosial*			*673,289,000*		
521211	Belanja Bahan			65,289,000		RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Bahan Operasional Kegiatan	10.0 Keg	1,761,000	17,610,000		
	- Konsumsi rapat pembahasan	691.0 OK	69,000	47,679,000		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			80,000,000		PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Implementasi RKUPHHK-HA/RKTUPHHK-H/IPK/IPPKH/Kelola Sosial dan Produksi Kayu Bulat Hutan Al	10.0 OT	8,000,000	80,000,000		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			528,000,000		RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Implementasi RKUPHHK-HA/RKTUPHHK-H/IPK/IPPKH/Kelola Sosial dan Produksi Kayu Bulat Hutan Al	66.0 OT	8,000,000	528,000,000		
B	*Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Rangka Evaluasi IHMB*			*480,983,000*		
521211	Belanja Bahan			71,283,000		PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Bahan Operasional Kegiatan	1.0 Keg	2,793,000	2,793,000		
	- Konsumsi rapat pembahasan	110.0 OK	69,000	7,590,000		
	- Spanduk	12.0 M2	75,000	900,000		
	- Personal Use	300.0 Org	200,000	60,000,000		
522151	Belanja Jasa Profesi			28,700,000		PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Honorarium narasumber Eseon II/Setara	20.0 OJ	1,400,000	28,000,000		
	- Honorarium Moderator	1.0 OK	700,000	700,000		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			30,000,000		PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Perjalanan Dinas Narasumber	10.0 OT	3,000,000	30,000,000		
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			351,000,000		PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Paket Meeting Fullboard	300.0 OH	1,000,000	300,000,000		
	- Uang Saku Fullboard	300.0 OH	150,000	45,000,000		
	- Transport Panitia / Narasumber	10.0 Org	600,000	6,000,000		
052	**Layanan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Hutan Tanaman**			**1,617,524,000**	**U**	
A	*Penilaian dan Persetujuan RKUPHHK-HTI*			*350,800,000*		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (029) KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UNIT ORG (03) Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
UNIT KERJA (465007) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
ALOKASI Rp.145,797,956,000

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	Belanja Bahan			27,750,000	PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Bahan Operasional Kegiatan	2.0 Keg	1,041,000	2,082,000	
	- Konsumsi rapat pembahasan	372.0 OK	69,000	25,668,000	
521211	Belanja Bahan			55,050,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Bahan Operasional Kegiatan	5.0 Keg	1,025,000	5,125,000	
	- Konsumsi rapat pembahasan	325.0 OK	69,000	22,425,000	
	- Kertas plotter	5.0 Set	500,000	2,500,000	
	- Tinta plotter	5.0 Set	5,000,000	25,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			52,500,000	PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Perjalanan Dinas dalam rangka penilaian dan persetujuan RKUPHHK-HTI	6.0 OT	8,750,000	52,500,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			157,500,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Perjalanan Dinas dalam rangka penilaian dan persetujuan RKUPHHK-HTI	18.0 OT	8,750,000	157,500,000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			29,000,000	PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Paket Meeting Fullboard	20.0 OK	1,000,000	20,000,000	
	- Uang Saku Fullboard	20.0 OH	150,000	3,000,000	
	- Transport peserta	20.0 OJ	300,000	6,000,000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			29,000,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Paket Meeting Fullboard	20.0 OK	1,000,000	20,000,000	
	- Uang Saku Fullboard	20.0 OH	150,000	3,000,000	
	- Transport peserta	20.0 OJ	300,000	6,000,000	
B	*Analisis Kawasan Hidrologis Gambut pada IUPHHK-HTI*			*332,300,000*	
521211	Belanja Bahan			34,500,000	PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Konsumsi rapat pembahasan	500.0 OK	69,000	34,500,000	
521211	Belanja Bahan			46,050,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Bahan Operasional Kegiatan	10.0 Keg	2,535,000	25,350,000	
	- Konsumsi rapat pembahasan	300.0 OK	69,000	20,700,000	
522191	Belanja Jasa Lainnya			103,000,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Langganan Googledrive	1.0 THN	3,000,000	3,000,000	
	- Training Analisa Kawasan Hidrologis Gambut Berbasis Spasial	1.0 KEG	100,000,000	100,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			105,000,000	PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Perjalanan Dinas dalam rangka analisis kawasan hidrologis gambut pada IUPHHK-HTI	12.0 OT	8,750,000	105,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (029) KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UNIT ORG (03) Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
UNIT KERJA (465007) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
ALOKASI Rp.145,797,956,000

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			43,750,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Perjalanan Dinas dalam rangka analisis kawasan hidrologis gambut pada IUPHHK-HTI	5.0 OT	8,750,000	43,750,000	
C	*Analisis Multiusaha dan Ketahanan Pangan*			*261,000,000*	
521211	Belanja Bahan			27,000,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Bahan Operasional Kegiatan	2.0 Keg	2,566,000	5,132,000	
	- Konsumsi rapat pembahasan	172.0 OK	69,000	11,868,000	
	- Personal Use	50.0 ORG	200,000	10,000,000	
522151	Belanja Jasa Profesi			24,000,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Honorarium Narasumber	3.0 OJ	1,000,000	3,000,000	
	- Honorarium Pakar/Pembahas/narasumber	12.0 OJ	1,400,000	16,800,000	
	- Honorarium Moderator	6.0 OK	700,000	4,200,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			87,500,000	PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Perjalanan Dinas dalam rangka Analisa Multiusaha dan Ketahanan Pangan	10.0 OT	8,750,000	87,500,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			43,750,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Perjalanan Dinas dalam rangka Analisa Multiusaha dan Ketahanan Pangan	5.0 OT	8,750,000	43,750,000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			78,750,000	PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Paket Meeting Fullboard	45.0 OH	1,300,000	58,500,000	
	- Uang Saku Peserta Fullboard	45.0 OH	150,000	6,750,000	
	- Transport peserta	45.0 OJ	300,000	13,500,000	
D	*Fasilitasi penyelesaian konflik di IUPHHK-HTI*			*372,124,000*	
521211	Belanja Bahan			23,416,000	PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Bahan operasional kegiatan	4.0 KEG	2,604,000	10,416,000	
	- Konsumsi rapat pembahasan	150.0 OK	65,000	9,750,000	
	- Konsumsi rapat di lapangan (dinas, bphp, dll)	50.0 OK	65,000	3,250,000	
521211	Belanja Bahan			28,408,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Bahan Operasional Kegiatan	4.0 Keg	2,227,000	8,908,000	
	- Konsumsi rapat pembahasan	200.0 OK	65,000	13,000,000	
	- Konsumsi rapat di lapangan (dinas, bphp, dll)	100.0 OK	65,000	6,500,000	
522151	Belanja Jasa Profesi			22,800,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Honorarium Narasumber	20.0 OJ	1,000,000	20,000,000	
	- Honorarium Moderator	4.0 OK	700,000	2,800,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			166,250,000	PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)				

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (029) KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UNIT ORG (03) Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
UNIT KERJA (465007) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
ALOKASI Rp.145,797,956,000

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
	- Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan tanaman budidaya	19.0 OT	8,750,000	166,250,000		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			131,250,000		RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Perjalanan Dinas dalam rangka Evaluasi Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan tanaman budidaya	15.0 OT	8,750,000	131,250,000		
E	*Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan HTR*			*155,400,000*		
521211	Belanja Bahan			11,750,000		RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Bahan Operasional Kegiatan	2.0 Keg	2,300,000	4,600,000		
	- Konsumsi rapat pembahasan	110.0 OK	65,000	7,150,000		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			99,900,000		PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Perjalanan Dinas dalam rangka pembinaan dan pengendalian pengelolaan HTR	12.0 OT	8,325,000	99,900,000		
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			43,750,000		PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Paket Meeting Fullboard	25.0 OH	1,300,000	32,500,000		
	- Uang Saku Peserta Fullboard	25.0 OH	150,000	3,750,000		
	- Transport peserta	25.0 OJ	300,000	7,500,000		
F	*Penanaman Bioenergi*			*145,900,000*		
521211	Belanja Bahan			16,800,000		PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Bahan Operasional Kegiatan	3.0 Keg	1,000,000	3,000,000		
	- Konsumsi rapat pembahasan	200.0 OK	69,000	13,800,000		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			93,500,000		PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Perjalanan Dinas dalam rangka percepatan pembangunan HTE	10.0 OT	9,350,000	93,500,000		
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			35,600,000		PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Paket Meeting Fullboard	20.0 OH	1,000,000	20,000,000		
	- Uang Saku Peserta Fullboard	20.0 OH	180,000	3,600,000		
	- Transport peserta	20.0 OJ	600,000	12,000,000		
5398.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	20.0 Lembaga		10,787,496,000		
	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT					
5398.QDB.001	**Pembinaan Teknis/ Supervisi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi**	**20.0 ha**		**10,787,496,000**		
051	**Pembinaan Teknis/ Supervisi Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam**			**1,775,998,000**	**U**	
A	*Evaluasi Administrasi*			*229,225,000*		
521211	Belanja Bahan			1,825,000		PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Bahan Operasional Kegiatan	1.0 Keg	1,825,000	1,825,000		
521211	Belanja Bahan			26,650,000		RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)					

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (029) KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UNIT ORG (03) Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
UNIT KERJA (465007) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
ALOKASI Rp.145,797,956,000

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Bahan Operasional Kegiatan	5.0 Keg	1,235,000	6,175,000	
	- Konsumsi rapat pembahasan	315.0 OK	65,000	20,475,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			750,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Pengadaan binder box arsip	15.0 Buah	50,000	750,000	
522131	Belanja Jasa Konsultan			100,000,000	PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Pemeliharaan sistem dan jaringan	2.0 Keg	50,000,000	100,000,000	
522131	Belanja Jasa Konsultan			100,000,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Pemeliharaan sistem dan jaringan	2.0 Keg	50,000,000	100,000,000	
B	*Evaluasi Lapangan*			*1,336,800,000*	
521211	Belanja Bahan			20,800,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Konsumsi rapat evaluasi kinerja IUPHHK-HA	220.0 Keg	65,000	14,300,000	
	- Konsumsi Rapat di lapangan (dinas, bphp dll)	100.0 OK	65,000	6,500,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			36,000,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Uang saku rapat di Dalam Kantor	100.0 OK	300,000	30,000,000	
	- Biaya kebersihan ruang rapat/pertemuan	4.0 Keg	1,500,000	6,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			880,000,000	PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Perjalanan Dinas dalam rangka tindaklanjut/clearence/ evaluasi kinerja/koordinasi	88.0 OT	10,000,000	880,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			400,000,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Perjalanan Dinas dalam rangka tindaklanjut/clearence/ evaluasi kinerja/koordinasi	40.0 OT	10,000,000	400,000,000	
C	*Bedah Kinerja IUPHHK-HA*			*209,973,000*	
521211	Belanja Bahan			2,000,000	PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Bahan Operasional Kegiatan	2.0 Keg	1,000,000	2,000,000	
521211	Belanja Bahan			5,384,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Bahan Operasional Kegiatan	2.0 Keg	1,312,000	2,624,000	
	- Konsumsi rapat pembahasan	40.0 OK	69,000	2,760,000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			9,600,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Honor Ketua Panitia	6.0 OK	400,000	2,400,000	
	- Honor Anggota Panitia	24.0 OK	300,000	7,200,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			54,000,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Bantuan Transport	180.0 OK	300,000	54,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			40,200,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (029) KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UNIT ORG (03) Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
UNIT KERJA (465007) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
ALOKASI Rp.145,797,956,000

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Bahan Operasional Kegiatan	5.0 Keg	1,235,000	6,175,000	
	- Konsumsi rapat pembahasan	315.0 OK	65,000	20,475,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			750,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Pengadaan binder box arsip	15.0 Buah	50,000	750,000	
522131	Belanja Jasa Konsultan			100,000,000	PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Pemeliharaan sistem dan jaringan	2.0 Keg	50,000,000	100,000,000	
522131	Belanja Jasa Konsultan			100,000,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Pemeliharaan sistem dan jaringan	2.0 Keg	50,000,000	100,000,000	
B	*Evaluasi Lapangan*			*1,336,800,000*	
521211	Belanja Bahan			20,800,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Konsumsi rapat evaluasi kinerja IUPHHK-HA	220.0 Keg	65,000	14,300,000	
	- Konsumsi Rapat di lapangan (dinas, bphp dll)	100.0 OK	65,000	6,500,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			36,000,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Uang saku rapat di Dalam Kantor	100.0 OK	300,000	30,000,000	
	- Biaya kebersihan ruang rapat/pertemuan	4.0 Keg	1,500,000	6,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			880,000,000	PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Perjalanan Dinas dalam rangka tindaklanjut/clearence/ evaluasi kinerja/koordinasi	88.0 OT	10,000,000	880,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			400,000,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Perjalanan Dinas dalam rangka tindaklanjut/clearence/ evaluasi kinerja/koordinasi	40.0 OT	10,000,000	400,000,000	
C	*Bedah Kinerja IUPHHK-HA*			*209,973,000*	
521211	Belanja Bahan			2,000,000	PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Bahan Operasional Kegiatan	2.0 Keg	1,000,000	2,000,000	
521211	Belanja Bahan			5,384,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Bahan Operasional Kegiatan	2.0 Keg	1,312,000	2,624,000	
	- Konsumsi rapat pembahasan	40.0 OK	69,000	2,760,000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			9,600,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Honor Ketua Panitia	6.0 OK	400,000	2,400,000	
	- Honor Anggota Panitia	24.0 OK	300,000	7,200,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			54,000,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Bantuan Transport	180.0 OK	300,000	54,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			40,200,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (029) KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UNIT ORG (03) Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
UNIT KERJA (465007) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
ALOKASI Rp.145,797,956,000

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	Belanja Bahan			30,715,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Bahan Operasional Kegiatan	4.0 Keg	1,000,000	4,000,000	
	- Konsumsi rapat pembahasan	411.0 OK	65,000	26,715,000	
522131	Belanja Jasa Konsultan			200,000,000	PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Maintenance Aplikasi SEHATI	4.0 KEG	50,000,000	200,000,000	
D	*Peningkatan Kapasitas Auditor PHPL*			*276,232,000*	
521211	Belanja Bahan			22,750,000	PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Konsumsi Rapat Pembahasan	350.0 OK	65,000	22,750,000	
521211	Belanja Bahan			76,162,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Bahan Operasional Kegiatan	4.0 Keg	3,538,000	14,152,000	
	- Konsumsi rapat pembahasan	354.0 OK	65,000	23,010,000	
	- Spanduk	48.0 M2	75,000	3,600,000	
	- Penggandaan Materi dan Laporan	148.0 EKS	50,000	7,400,000	
	- Personal Use	140.0 ORG	200,000	28,000,000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			4,000,000	PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Honor Ketua Panitia	4.0 OK	400,000	1,600,000	
	- Honor Anggota Panitia	8.0 OK	300,000	2,400,000	
522151	Belanja Jasa Profesi			11,200,000	PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Honorarium narasumber Eseon II/Setara	8.0 OJ	1,400,000	11,200,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			162,120,000	PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Paket Meeting Fullboard	160.0 OH	837,000	133,920,000	
	- Uang Saku Fullboard	140.0 OH	150,000	21,000,000	
	- Transport Panitia	12.0 ORG	600,000	7,200,000	
E	*Pelatihan Operator SEHATI*			*263,960,000*	
521211	Belanja Bahan			69,250,000	PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Bahan Operasional Kegiatan	4.0 Keg	3,500,000	14,000,000	
	- Konsumsi rapat pembahasan	250.0 OK	65,000	16,250,000	
	- Spanduk	48.0 M2	75,000	3,600,000	
	- Penggandaan Materi dan Laporan	148.0 EKS	50,000	7,400,000	
	- Personal Use	140.0 ORG	200,000	28,000,000	
521211	Belanja Bahan			17,550,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Konsumsi Rapat Pembahasan	270.0 OK	65,000	17,550,000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			4,000,000	PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)				

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (029) KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UNIT ORG (03) Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
UNIT KERJA (465007) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
ALOKASI Rp.145,797,956,000

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
	- Honor Ketua Panitia	4.0 OK	400,000	1,600,000		
	- Honor Anggota Panitia	8.0 OK	300,000	2,400,000		
522151	Belanja Jasa Profesi			11,200,000		PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Honorarium narasumber Eseon II/Setara	8.0 OJ	1,400,000	11,200,000		
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			161,960,000		PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Paket Meeting Fullboard	160.0 OH	836,000	133,760,000		
	- Uang Saku Fullboard	140.0 OH	150,000	21,000,000		
	- Transport Panitia	12.0 ORG	600,000	7,200,000		
053	**Pembinaan Teknis/ Supervisi Penerapan Silvikultur Intensif/ Pemanenan Ramah Lingkungan (RIL)**			**6,440,060,000**	**U**	
A	*Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penerapan SILIN*			*608,955,000*		
521211	Belanja Bahan			84,655,000		RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Bahan Operasional Kegiatan	2.0 Keg	5,137,500	10,275,000		
	- Konsumsi rapat pembahasan	310.0 OK	69,000	21,390,000		
	- Spanduk	210.0 M2	69,000	14,490,000		
	- Penggandaan Materi dan Laporan	140.0 EKS	75,000	10,500,000		
	- Personal Use	140.0 ORG	200,000	28,000,000		
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			16,800,000		RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Transportasi peserta ke lapangan	140.0 OH	120,000	16,800,000		
522151	Belanja Jasa Profesi			232,100,000		RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Honorarium Narasumber	20.0 OJ	1,000,000	20,000,000		
	- Honorarium Pakar/Pembahas/narasumber	150.0 OJ	1,400,000	210,000,000		
	- Honorarium Moderator	3.0 OK	700,000	2,100,000		
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			275,400,000		RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Paket Meeting Fullboard	210.0 OH	1,000,000	210,000,000		
	- Uang Saku Fullboard	210.0 OH	140,000	29,400,000		
	- Bantuan Transport Peserta	90.0 ORG	400,000	36,000,000		
B	*Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penerapan RIL*			*1,032,950,000*		
521211	Belanja Bahan			88,750,000		RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Bahan Operasional Kegiatan	2.0 Keg	7,185,000	14,370,000		
	- Konsumsi rapat pembahasan	310.0 OK	69,000	21,390,000		
	- Spanduk	210.0 M2	69,000	14,490,000		
	- Penggandaan Materi dan Laporan	140.0 EKS	75,000	10,500,000		
	- Personal Use	140.0 ORG	200,000	28,000,000		
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			16,800,000		RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Transportasi peserta ke lapangan	140.0 OH	120,000	16,800,000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (029) KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UNIT ORG (03) Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
UNIT KERJA (465007) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
ALOKASI Rp.145,797,956,000

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	Belanja Jasa Profesi			213,400,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Honorarium Narasumber	2.0 OJ	1,000,000	2,000,000	
	- Honorarium Pakar/Pembahas/narasumber	150.0 OJ	1,400,000	210,000,000	
	- Honorarium Moderator	2.0 OK	700,000	1,400,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			714,000,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Paket Meeting Fullboard	600.0 OH	1,000,000	600,000,000	
	- Uang Saku Peserta Fullboard	600.0 OH	140,000	84,000,000	
	- Bantuan Transport Peserta	150.0 OK	200,000	30,000,000	
C	*Pendampingan Percepatan Penerapan SILIN*			*2,290,378,000*	
521211	Belanja Bahan			106,378,000	PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Bahan Operasional Kegiatan	20.0 Keg	4,000,000	80,000,000	
	- Konsumsi rapat pembahasan (2 kali snack)	160.0 OK	91,000	14,560,000	
	- Konsumsi rapat pembahasan (1 kali snack)	118.0 OK	69,000	8,142,000	
	- Penggandaan materi	9190.0 Lbr	400	3,676,000	
522151	Belanja Jasa Profesi			224,000,000	PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Honorarium Pakar/ Pembahas Setara Eselon II	160.0 OJ	1,400,000	224,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			1,592,500,000	PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi /Konsultasi SILIN	47.0 OT	7,500,000	352,500,000	
	- Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendampingan Pelaksanaan SILIN	105.0 OT	8,000,000	840,000,000	
	- Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monev IUPHHK-HA Pelaksana SILIN	50.0 OT	8,000,000	400,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			367,500,000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi /Konsultasi SILIN	1.0 OT	7,500,000	7,500,000	
	- Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendampingan Pelaksanaan SILIN	45.0 OT	8,000,000	360,000,000	
D	*Pendampingan Percepatan Penerapan RIL*			*1,948,987,000*	
521211	Belanja Bahan			106,487,000	PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Bahan Operasional Kegiatan	20.0 Keg	4,182,350	83,647,000	
	- Konsumsi rapat pembahasan (2 kali snack)	160.0 OK	91,000	14,560,000	
	- Konsumsi rapat pembahasan (1 kali snack)	120.0 OK	69,000	8,280,000	
522151	Belanja Jasa Profesi			140,000,000	PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Honorarium Pakar/ Pembahas Setara Eselon II	100.0 OJ	1,400,000	140,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			1,067,500,000	PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi /Konsultasi RIL	25.0 OT	7,500,000	187,500,000	
	- Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monev IUPHHK-HA	30.0 OT	8,000,000	240,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (029) KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UNIT ORG (03) Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
UNIT KERJA (465007) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
ALOKASI Rp.145,797,956,000

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
	Percepatan Pelaksanaan RIL	30.0 OT	8,000,000	240,000,000		
	- Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendampingan Percepatan Pelaksanaan RIL	80.0 OT	8,000,000	640,000,000		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			635,000,000		RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi /Konsultasi RIL	10.0 OT	7,500,000	75,000,000		
	- Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monev IUPHHK-HA Percepatan Pelaksanaan RIL	30.0 OT	8,000,000	240,000,000		
	- Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendampingan Percepatan Pelaksanaan RIL	40.0 OT	8,000,000	320,000,000		
E	*Pengembangan Database SILIN*			*558,790,000*		
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			148,260,000		RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Server	1.0 Unit	100,000,000	100,000,000		
	- Memori server	2.0 Unit	15,000,000	30,000,000		
	- Hardisk server	1.0 Unit	18,260,000	18,260,000		
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya			120,000,000		RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Biaya langganan jaringan selama 12 bulan	12.0 Bln	10,000,000	120,000,000		
522131	Belanja Jasa Konsultan			144,670,000		RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Biaya pengembangan Database SILIN	2.0 Keg	48,000,000	96,000,000		
	- Migrasi Server	1.0 Keg	48,670,000	48,670,000		
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			145,860,000		RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Paket meeting fullboard	102.0 OK	1,000,000	102,000,000		
	- uang harian	102.0 OH	130,000	13,260,000		
	- uang transport	102.0 OK	300,000	30,600,000		
054	**Pembinaan Teknis/ Supervisi Mitigasi Karhutla**			**400,050,000**	**U**	
A	*TANPA SUB KOMPONEN*			*400,050,000*		
521211	Belanja Bahan			31,160,000		PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Bahan Operasional Kegiatan	4.0 Keg	1,030,000	4,120,000		
	- Konsumsi rapat pembahasan	416.0 OK	65,000	27,040,000		
521211	Belanja Bahan			28,890,000		RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Bahan Operasional Kegiatan	4.0 Keg	1,015,000	4,060,000		
	- Konsumsi rapat pembahasan	382.0 OK	65,000	24,830,000		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			190,000,000		PNP
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Perjalanan Dinas dalam rangka Supervisi Penanganan Karhutla pada IUPHHK	19.0 OT	10,000,000	190,000,000		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			150,000,000		RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Perjalanan Dinas dalam rangka Supervisi Penanganan Karhutla pada IUPHHK	15.0 OT	10,000,000	150,000,000		
5399	Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran			8,256,395,000		